

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perkembangan perekonomian global yang saling terintegrasi telah mengakibatkan dampak krisis keuangan di suatu negara berimbas ke negara lain. Contoh dari peristiwa tersebut adalah krisis moneter 1998 yang memberikan dampak buruk pada banyak negara berkembang. Contoh yang lain adalah krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008 juga memberikan dampak sistemik pada perekonomian negara lain. Kedua krisis tersebut memiliki kecenderungan yang sama yaitu pergeseran arus modal yang besar dan serentak, sehingga berdampak pada masalah likuiditas pada sektor keuangan.

Perekonomian Indonesia mengalami salah satu kondisi terburuknya pada tahun 1998, yang terbukti banyak bank di Indonesia yang dilikuidasi akibat krisis tersebut. Dampak krisis tersebut masih bisa dirasakan hingga saat ini, yaitu negara memiliki beban hutang luar negeri yang ditinggalkan krisis tersebut. Dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008 terhadap Indonesia tidak sebesar krisis pada tahun 1998. Perekonomian Indonesia bahkan bisa dikatakan tidak terpengaruh secara signifikan dan langsung oleh krisis pada tahun 2008 tersebut.

Menurut Bank Indonesia, kinerja pertumbuhan makro ekonomi Indonesia cukup baik. Tahun 2008 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,0%, tetapi akibat dampak krisis di Amerika Serikat dan Eropa tersebut pada tahun 2009

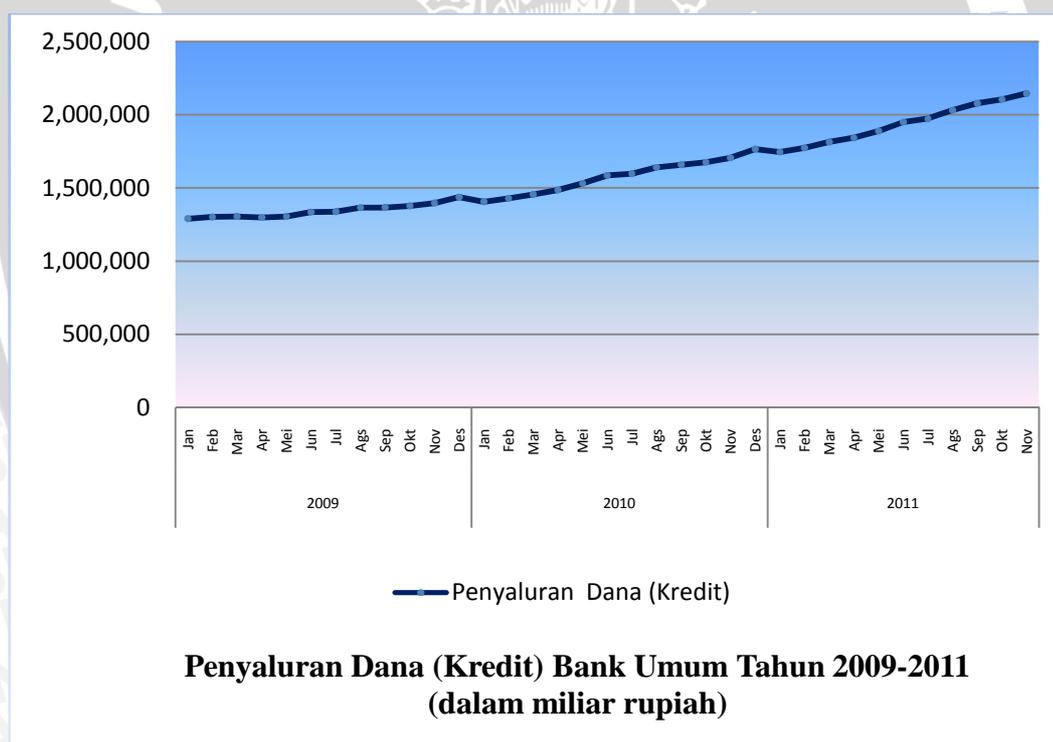
pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,6%. Tahun 2010, di tengah kondisi perekonomian global yang semakin kondusif Indonesia mencatatkan angka 6,1% pada pertumbuhan ekonominya. Akhir tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5%, dan Bappenas memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 sebesar 6,7%.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan peran bank sangat sentral dalam perekonomian di masyarakat. Fungsi pengawasan perbankan dipegang penuh oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia selalu mengawasi dan mengawal perkembangan bank secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung adalah melakukan analisa periodik terhadap kesehatan keuangan perbankan.

Menyediakan kebutuhan pendanaan modal bagi masyarakat adalah salah satu kegiatan bank. Kepemilikan modal adalah suatu yang penting bagi para pelaku usaha, semakin besar modal yang dimiliki sebanding dengan potensi besarnya usaha yang dijalankan. Peran bank dalam mendukung pendanaan tersebut adalah mengeluarkan fasilitas yang berupa kredit. Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”. Kredit akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak jika dikelola dengan baik.

Kredit perbankan di Indonesia menjadi sumber permodalan yang diminati dari pada sumber permodalan lainnya. Kredit perbankan sangat diperlukan oleh masyarakat yang salah satunya untuk meningkatkan daya guna suatu barang dan jasa. Kredit perbankan merupakan pilihan utama untuk mendanai sektor usaha kecil bagi beberapa pengusaha, sehingga peran bank sangat penting dalam mengerakan sektor perekonomian dan membantu usaha pemerintah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Gambar 1

Penyaluran Dana (Kredit) Bank Umum Tahun 2009 – 2011

Menurut grafik mengenai Penyaluran Dana (Kredit) Bank Umum Tahun 2009-2011, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit perbankan nasional terus

mengalami kenaikan. Data tersebut berarti kebutuhan akan kredit di masyarakat sangat penting, dan diharapkan dengan peningkatan kredit tersebut berimbas pada kemajuan perekonomian nasional. Usaha tersebut membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan pemberi kredit (perbankan) dalam pelaksanaannya, karena semakin besar kredit tersebut sebanding dengan resiko yang dihadapi. Peran perbankan dalam memberikan kredit haruslah cermat, sehingga kredit yang diberikan terserap dengan baik pada sektor riil dengan sejauh mungkin menghindari resiko-resikonya. Salah satu manfaat kredit pada sektor riil adalah kredit dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dalam masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur perekonomian.

Salah satu kredit yang diberikan bank dalam rangka membantu pendanaan pelaku usaha tersebut adalah Kredit Modal Kerja (KMK). Pengertian Kredit Modal Kerja menurut Kasmir (2003:77) adalah:

Kredit Modal Kerja merupakan kredit jangka pendek yang diberikan oleh bank kepada masyarakat atau perusahaan (debitur) untuk memenuhi modal kerjanya. Modal yang didapat dari kredit tersebut dapat mempelancar dan meningkatkan operasionalnya, juga untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usahanya.

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. Contoh penggunaan Kredit Modal Kerja adalah digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Adanya Kredit Modal Kerja tersebut baik pihak bank atau peminjam (debitur) sama-sama mendapat keuntungan. Peminjam mendapat keuntungan berupa suntikan modal yang

digunakan untuk memperbesar usahanya, sedangkan pihak bank mendapat keuntungan dari bunga kredit tersebut.

Bank haruslah selektif dalam memberikan kredit tersebut. Banyak aspek penilaian yang dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit. Salah satu aspek penilaian tersebut adalah menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*), selain itu pertimbangan tentang besarnya pembiayaan dan besarnya usaha yang dijalankan juga penting untuk mengetahui tepat atau tidaknya pemberian kredit tersebut.

Resiko dalam pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja selalu ada. Perbankan sebagai pemberi kredit hendaknya memperhatikan dan berusaha untuk memperkecil berbagai resiko tersebut. Memperkecil resiko pemberian kredit dalam perbankan diperlukannya adanya manajemen pemberian kredit yang baik. Pengawasan dan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen pemberian kredit yang mendukung usaha memperkecil resiko kredit. Pengawasan kredit harus dilaksanakan oleh petugas bank secara periodik dan berkelanjutan, agar pemberian kredit tersebut tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan kreditur. “Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet” (Hasibuan, 2007:105). Kredit yang macet merupakan kerugian bagi bank yang bersangkutan, sehingga penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut terdapat dalam pengendalian intern pemberian kredit. Pengendalian intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan

guna menjaga dan mengamankan kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan (kerugian, kecurangan/*fraud*, pelanggaran aspek kehati-hatian), meningkatkan efektifitas organisasi, dan meningkatkan efisiensi biaya. Pengendalian intern tersebut harus didukung dengan sistem pengendalian kredit yang memadai. Sistem pengendalian kredit ada tiga yaitu *Internal Control of Credit*, *Audit Control of Credit*, dan *External Control of Credit* (Hasibuan, 2007:105). Sistem pengendalian kredit ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar proses pengawasan dan pengendalian kredit.

Penilaian yang tepat oleh bank kepada debiturnya sebelum memberikan Kredit Modal Kerja sangat diperlukan, agar menghindari resiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap pengembalian kredit tersebut). Sifat debitur dalam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman adalah wajib, sehingga kegagalan debitur dalam membayar kewajibannya akan mempengaruhi kinerja dari operasional bank. Rasio dari kredit macet yang cukup besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Sebuah bank dalam kondisi tidak sehat maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan usaha dari bank tersebut. Peran bank sangat sentral dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

Menurut grafik mengenai *Non Performing Loan* (NPL) Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan pada tahun 2009-2011, didapat sebuah kesimpulan bahwa *Non Performing Loan* dari Kredit Modal Kerja ada kecenderungan

satu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Fasilitas pinjaman kredit tersebut dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha, yaitu untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan. Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkisar antara 100 juta rupiah sampai 40 miliar rupiah dengan waktu pinjaman antara 1 tahun sampai 3 tahun (www.bri.co.id). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memiliki visi menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah tersebut sangat diperhatikan dengan usaha yang baik dalam melakukan semua usahanya, salah satu contohnya meningkatkan pelayanan prima terhadap pemberian kredit yang didukung dengan manajemen perkreditan yang bagus. Pengendalian intern dalam pemberian kredit sangat dibutuhkan, karena untuk menghindari berbagai masalah perkreditan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2011 mencatat laba setelah taksiran pajak sebesar 15,08 triliun rupiah atau mengalami peningkatan 31,47% dari tahun 2010 sebesar 11,47 triliun rupiah (www.kompas.com). Total penyaluran kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2011 sebesar 283,59 triliun rupiah atau naik 14,83% dari tahun 2010 sebesar 246,97 triliun rupiah, dengan *Non Performing Loan* pada tahun 2011 sebesar 2,30% dan *Non Performing Loan* tahun 2010 sebesar 2,78%. (www.bri.co.id). Bank Indonesia menyarankan batas *Non Performing Loan* adalah 5% tetapi *Non Performing Loan* sebesar 2% - 3% termasuk kurang baik, idealnya *Non Performing Loan* adalah 0%. Berdasarkan data tersebut sehingga perlu diadakannya penelitian mengenai *Non Performing Loan* Kredit Modal Kerja pada bank umum, sehingga diharapkan

penyaluran Kredit Modal Kerja sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni percepatan pembangunan perekonomian.

Objek yang menjadi tempat penelitian ini adalah salah satu cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berada di Kota Malang Jawa Timur, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi merupakan salah satu bank yang memiliki cakupan operasi yang luas di Malang, terutama pada sektor UMKM. Adanya unsur resiko dan ketidakpastian dalam pemberian kredit menyebabkan diperlukannya suatu pengawasan kredit. Pengawasan kredit yang dilakukan sering kali kurang memperhatikan aspek-aspek pengendalian intern. Adapun kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi selama tiga tahun terakhir adalah:

Tabel 1
Data *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Modal Kerja
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi
Tahun 2009-Tahun 2011

Tahun	Total Kredit (Juta Rupiah)	Tunggakan Kredit (Juta Rupiah)	NPL
2009	372.561	10.273	2,76%
2010	422.763	25.752	6,09%
2011	568.874	8.326	1,46%

Sumber : Data diolah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi

Menurut tabel mengenai Data *Non Performing Loan* Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi Tahun 2009-Tahun 2011 setiap tahunnya terdapat tunggakan kredit. *Non Performing Loan* Tahun 2010 sebesar 6,09% jumlah ini melebihi saran dari Bank Indonesia mengenai *Non Performing Loan* maksimal 5%. Berdasarkan uraian tersebut dapat diindikasikan terjadi ketidak efektif pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi. Pemberian kredit yang baik adalah ketika kreditur dapat mempertimbangkan kemampuan mengembalikan pinjaman oleh debitur, sehingga setiap pemberian kredit harus berusaha menjaga *Non Performing Loan* sebesar 0% atau tidak ada kredit yang bermasalah. Usaha menekan kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi adalah menerapkan pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit.

Pengendalian dalam pemberian kredit sangat mutlak dibutuhkan, sehingga mengendalikan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu pengendalian intern yang harus dilakukan oleh pejabat yang berhubungan dengan pemberian kredit sampai dengan kredit dilunasi. Tujuan utama dari diadakannya pengendalian intern perkreditan adalah untuk mencapai portofolio kredit yang sehat serta menghindari kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Penyalahgunaan dan kesalahan pada prosedur pemberian kredit pada akhirnya akan memberikan kerugian pada perusahaan perbankan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja dalam Usaha Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah**” (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi?
2. Apakah penerapan pengendalian intern terhadap sistem pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi sudah mendukung usaha mengantisipasi kredit bermasalah?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi.
2. Untuk mengetahui penerapan pengendalian intern terhadap sistem pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi dalam usaha mengantisipasi kredit bermasalah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi Penulis

Merupakan kesempatan bagi peneliti di dalam usaha memperluas wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang berhubungan langsung dengan teori-teori yang didapat dalam menempuh pendidikan.

b. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi bagi penelitian lainnya yang juga ingin mengkaji prosedur pemberian Kredit Modal Kerja.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi dalam mengambil keputusan pemberian kredit di masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kronologis dari penulisan skripsi ini maka dibuatkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi tentang uraian secara garis besar isi dari keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan kajian teoritis. Dimana kajian teoritis tersebut untuk menunjang pembahasan penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai macam buku yang ada, juga dari literatur dan semua itu saling berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan teori dan kajian teoritis tersebut meliputi: sistem dan prosedur akuntansi, formulir dokumen, pengendalian intern, teori tentang perkreditan, dan teori tentang perbankan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan. Menguraikan perusahaan yang diteliti yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang Kawi serta analisis pengendalian intern terhadap pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.